

Penataan Aset Melawi Dewan Sarankan Pemkab Koordinasi Dengan Kabupaten Sintang

Eko Susilo

Borneo Tribune, Nanga Pinoh

Saat ini penataan aset terus digencarkan Pemkab Melawi melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Melawi. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Melawi, Amri Kalam bahkan meminta agar dalam menginventarisir aset Melawi terutama yang bermasalah dalam hal administrasi, Pemkab dapat terus melakukan koordinasi dengan kabupaten induk, Sintang, termasuk ke Pemerintah Provinsi.

Hal tersebut diungkapkan Amri Kalam saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/10).

"Saya sangat mendukung kerja DPPKAD untuk melakukan inventarisasi aset Melawi. Bahkan kita juga meminta agar koordinasi terus dilakukan ke Pemerintah Provinsi maupun ke kabupaten Sintang yang merupakan kabupaten induk," ujarnya.

Persoalan aset ini sendiri tak terlepas dari Kabupaten Sintang karena sebagian aset Melawi merupakan penyerahan dari Kabupaten Sintang saat pemekaran wilayah. Oleh karena itu, menurut Amri, Sintang tetap harus bertanggung jawab dalam persoalan aset tersebut, terutama untuk membantu melengkapi persoalan administrasi seperti surat-surat berharga, sertifikat maupun dokumen perjanjian.

"Aset yang diserahkan saat itu kan beberapa ada yang belum dilengkapi dengan aspek legal. Makanya ini yang harus ditindaklanjuti hingga ke kabupaten induk," terangnya.

Dewan sendiri, menurut

Amri tidak bisa menyikapi persoalan aset secara teknis mengingat keterbatasan SDM yang ada di DPRD. Peran DPRD lebih kepada aspek politis untuk mendesak pemerintah untuk melakukan penataan aset. Termasuk rencana pansus aset yang sempat diwacanakan sejumlah anggota DPRD beberapa waktu lalu.

"Namun, saat ini lebih tepat ditangani langsung oleh alat kelengkapan DPRD seperti Komisi C yang memang membidangi persoalan aset. Bila ditangani oleh pansus, sepertinya tidak akan efektif, karena pansus merupakan panitia ad hoc yang kerjanya terbatas oleh waktu," katanya.

Sementara, bila ditangani oleh komisi, maka komisi dapat melakukan monitoring penataan aset dalam jangka waktu yang lebih panjang. Apalagi, kata Amri, pansus aset sudah pernah dibentuk sebelumnya dan sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah.

"Tinggal melihat, apakah rekomendasi yang dihasilkan melalui pansus beberapa waktu lalu sudah ditindaklanjuti oleh instansi teknis terkait," katanya.

Amri menyarankan, agar persoalan aset tidak berpengaruh dalam opini BPK terkait laporan keuangan Pemkab Melawi. DPPKAD dapat memisahkan aset yang benar-benar tidak memiliki permasalahan dengan aset yang masih belum jelas. □